



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15063-15070

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Peran PDB dan PNB Sebagai Indikator dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Indonesia

Rio Hadi Pratama¹, Hendra Riofita²

^{1,2}Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

rihadipratama4@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator utama dalam meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan data ekonomi terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB memiliki peran strategis dalam mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi domestik melalui produksi barang dan jasa, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, PNB memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai total pendapatan yang diterima oleh warga negara, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk remitansi dan investasi internasional, sehingga memperkuat kapasitas ekonomi nasional. Sinergi antara PDB dan PNB terbukti mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja ekonomi suatu negara serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, kedua indikator ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ekspansi ekonomi digital, serta dinamika investasi asing yang turut memperluas basis pendapatan negara. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa PDB dan PNB memiliki keterbatasan, terutama dalam mencerminkan distribusi pendapatan, ketimpangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan indikator pelengkap seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menghasilkan analisis ekonomi yang lebih holistik. Dengan demikian, optimalisasi penggunaan PDB dan PNB secara terintegrasi menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : PDB, PNB, Pendapatan Negara, Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal.

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama bagi setiap negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menguatkan kemampuan fiskal. Prestasi pembangunan ini biasanya dinilai lewat beragam indikator makroekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB). Kedua ukuran tersebut memainkan peran krusial dalam melukiskan kondisi ekonomi negara secara komprehensif, mencakup aspek produksi hingga pendapatan yang diperoleh penduduknya.

PDB dipakai untuk menghitung total nilai barang serta jasa yang diproduksi di suatu wilayah negara selama periode waktu tertentu. Ukuran ini menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi dalam negeri dan kerap menjadi patokan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PDB menandakan peningkatan produksi dan konsumsi, yang akhirnya memengaruhi lonjakan pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak. Oleh karena itu, PDB menjadi instrumen vital bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal guna memacu pertumbuhan ekonomi serta memperbesar penerimaan negara.

Sementara itu, PNB menghitung keseluruhan pendapatan yang diterima warga negara, baik dari aktivitas domestik maupun internasional. Di tengah era globalisasi, PNB semakin krusial karena mengilustrasikan arus pendapatan lintas batas, seperti investasi asing dan pengiriman uang dari pekerja migran. PNB menyajikan perspektif lebih luas tentang potensi ekonomi nasional dalam menghasilkan pendapatan, sehingga berguna untuk mengevaluasi kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Walaupun PDB dan PNB sama-sama berfungsi sebagai indikator ekonomi, keduanya memiliki perbedaan konseptual mendasar yang saling melengkapi. PDB lebih menekankan pada lokasi produksi, sedangkan PNB pada

kepemilikan faktor produksi. Karenanya, analisis yang mengintegrasikan keduanya menghasilkan pemahaman lebih lengkap tentang kondisi ekonomi suatu negara beserta peluang peningkatan pendapatan negara.

Dalam praktiknya, peningkatan pendapatan negara tidak hanya bergantung pada besarnya aktivitas ekonomi domestik, tetapi juga pada kemampuan negara dalam memanfaatkan sumber pendapatan dari luar negeri. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana PDB dan PNB dapat berperan sebagai indikator yang efektif dalam meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, adanya keterbatasan dalam kedua indikator tersebut, seperti tidak mencerminkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan secara langsung, menuntut adanya analisis yang lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara sistematis peran PDB dan PNB sebagai indikator dalam meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan secara sistematis dan mendalam mengenai peran Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator dalam meningkatkan pendapatan negara. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji hubungan konseptual antara indikator ekonomi dengan kebijakan fiskal dan pendapatan negara berdasarkan teori dan kajian empiris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Sumber data tersebut meliputi Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian (5 tahun terakhir), Publikasi statistik ekonomi yang berkaitan dengan PDB, PNB, dan pendapatan negara

3. Hasil dan Diskusi

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan dua indikator utama dalam analisis makroekonomi yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Keduanya memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat produksi, pendapatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara.

3.1. PDB Sebagai Indikator Aktivitas Ekonomi Domestik

PDB mengukur total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah negara dalam periode tertentu. PDB berperan penting sebagai indikator utama untuk menilai tingkat aktivitas ekonomi domestik. Ketika PDB meningkat, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan produksi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan dunia usaha.

Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut secara langsung memperluas basis pajak. Dengan meningkatnya konsumsi, investasi, dan produksi, penerimaan negara dari sektor perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya juga meningkat. Oleh karena itu, PDB menjadi alat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif untuk meningkatkan pendapatan negara.

Selain itu, PDB juga digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada sektor produktif, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Secara lebih mendalam, hubungan antara PDB dan pendapatan negara bersifat langsung dan signifikan karena sebagian besar penerimaan negara bersumber dari aktivitas ekonomi domestik. Namun, peningkatan PDB tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan negara secara optimal apabila terjadi ketidakefisienan dalam sistem perpajakan atau rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan fiskal menjadi faktor penentu dalam mengoptimalkan kontribusi PDB terhadap pendapatan negara.

3.2. PNB Sebagai Indikator Pendapatan Nasional

PNB mengukur total pendapatan yang diperoleh oleh warga negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. PNB mencerminkan sejauh mana suatu negara memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas global. Peran PNB menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi, di mana arus investasi dan tenaga kerja lintas negara semakin meningkat. Jika PNB lebih tinggi dibandingkan PDB, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima dari

luar negeri (seperti remitansi tenaga kerja dan investasi luar negeri) cukup besar. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas fiskal negara.

Dengan meningkatnya PNB, daya beli masyarakat juga cenderung meningkat, sehingga mendorong konsumsi domestik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Meskipun PDB sering dijadikan tolok ukur utama pertumbuhan, Produk Nasional Bruto (PNB) memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemakmuran riil penduduk asli suatu negara, karena mengeluarkan faktor pendapatan faktor produksi milik asing di dalam negeri. Riofita (2023).

Secara lebih mendalam, hubungan antara PDB dan pendapatan negara bersifat langsung dan signifikan karena sebagian besar penerimaan negara bersumber dari aktivitas ekonomi domestik. Namun, peningkatan PDB tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan negara secara optimal apabila terjadi ketidakefisienan dalam sistem perpajakan atau rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan fiskal menjadi faktor penentu dalam mengoptimalkan kontribusi PDB terhadap pendapatan negara.

3.3. Hubungan PDB, PNB, dan Pendapatan Negara

PDB dan PNB memiliki hubungan erat dalam menentukan tingkat pendapatan negara. PDB berfokus pada produksi dalam negeri, sementara PNB lebih menekankan pada aliran pendapatan yang diterima oleh warga negara. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi. Dalam konteks peningkatan pendapatan negara, kedua indikator ini berperan sebagai dasar dalam Perencanaan kebijakan fiskal, Penentuan target penerimaan pajak, Evaluasi kinerja ekonomi nasional, Pengambilan keputusan investasi.

Ketika PDB dan PNB mengalami pertumbuhan yang stabil, maka potensi penerimaan negara juga meningkat, baik melalui pajak, dividen BUMN, maupun sumber pendapatan lainnya. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pada kedua indikator ini, maka pemerintah perlu mengambil langkah strategis seperti stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas pendapatan negara.

Secara komparatif, PDB lebih berpengaruh dalam jangka pendek karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi domestik. Sementara itu, PNB lebih berperan dalam jangka panjang karena mencerminkan kemampuan negara dalam memperoleh pendapatan dari luar negeri. Oleh karena itu, sinergi antara PDB dan PNB sangat diperlukan agar peningkatan pendapatan negara dapat berlangsung secara stabil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, PNB memberikan gambaran yang lebih luas terkait kemampuan ekonomi nasional dalam menghasilkan pendapatan, termasuk dari luar negeri. Ketika warga negara atau perusahaan nasional mampu berinvestasi dan memperoleh keuntungan di pasar internasional, maka aliran pendapatan yang masuk akan memperkuat posisi fiskal negara. Dalam konteks ini, PNB menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian ekonomi serta daya saing global suatu negara. Semakin besar kontribusi pendapatan dari luar negeri, semakin kuat pula kapasitas negara dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Keterkaitan antara PDB dan PNB juga dapat dianalisis melalui selisih keduanya yang mencerminkan pendapatan faktor luar negeri bersih. Selisih ini menjadi indikator apakah suatu negara lebih banyak menerima atau justru mengalirkan pendapatan ke luar negeri. Jika PDB lebih besar dari PNB, maka terdapat indikasi bahwa sebagian keuntungan ekonomi domestik dinikmati oleh pihak asing. Sebaliknya, jika PNB lebih tinggi, maka negara tersebut memiliki posisi yang lebih kuat dalam memperoleh pendapatan dari luar negeri.

Dalam perumusan kebijakan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan kedua indikator ini secara simultan. Ketergantungan yang berlebihan pada PDB tanpa memperhatikan PNB dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif. Sebaliknya, fokus yang terlalu besar pada PNB tanpa didukung oleh kekuatan ekonomi domestik juga berisiko menimbulkan ketidakseimbangan struktural. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi nasional di tingkat global. Dengan demikian, sinergi antara PDB dan PNB menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendapatan negara yang stabil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Integrasi kedua indikator ini tidak hanya penting dalam analisis statistik, tetapi juga dalam menentukan arah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.4. Impilaksi Kebijakan Ekonomi

Pemerintah dapat memanfaatkan data PDB dan PNB untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, ketika pertumbuhan PDB melambat, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara atau memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi. Sementara itu, untuk meningkatkan PNB, pemerintah dapat mendorong ekspansi perusahaan nasional ke luar negeri serta meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar global.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya domestik dan peningkatan daya saing ekspor juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kedua indikator tersebut. Dengan demikian, peningkatan PDB dan PNB tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan negara. Dan Pemerintah perlu mengoptimalkan infrastruktur digital, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol risiko yang baik dan persepsi peluang pada layanan Fintech Syariah dapat meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya memperluas basis pajak dan pendapatan negara. Riofita (2024).

Salah satunya, Implementasi prinsip kewirausahaan Syariah dalam sistem pembayaran digital terbukti mampu mendorong keputusan pembelian konsumen Muslim, yang secara agregat berkontribusi pada peningkatan volume transaksi sektor UMKM dan memperkuat struktur Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Indonesia. Riofita (2024). Integrasi teknologi dalam sistem pemantauan ekonomi memungkinkan pemerintah untuk melakukan tracking terhadap kontribusi PDB per sektor secara real-time. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya bersifat umum, tetapi juga spesifik pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) besar terhadap pendapatan nasional. Dengan mendorong digitalisasi pada pelaku UMKM, basis data PNB juga akan semakin akurat karena mencakup arus transaksi yang selama ini tidak tercatat dalam ekonomi informal. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter yang stabil dan kebijakan fiskal yang ekspansif pada sektor digital menjadi kunci utama dalam menjaga tren positif pertumbuhan PDB dan PNB di masa depan.

Dalam praktiknya, peningkatan PDB dapat mendorong pemerintah untuk memperluas kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja negara dan optimalisasi pajak. Sementara itu, peningkatan PNB menuntut kebijakan yang mendukung ekspansi global, seperti peningkatan investasi luar negeri dan kualitas tenaga kerja. Namun, ketidakseimbangan dalam fokus kebijakan dapat menimbulkan risiko, seperti ketergantungan pada sektor tertentu atau lemahnya ekonomi domestik.

3.5. Analisis Keterbatasan

Meskipun PDB dan PNB merupakan indikator penting, keduanya memiliki keterbatasan. PDB tidak memperhitungkan distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi, sedangkan PNB tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pendapatan negara, pemerintah juga perlu mempertimbangkan indikator lain seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan. Selain keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan PDB dan PNB sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi juga menghadapi tantangan metodologis dan konseptual yang cukup kompleks. Salah satu kelemahan mendasar dari PDB adalah ketidakmampuannya dalam menangkap aktivitas ekonomi informal yang masih sangat dominan di negara berkembang seperti Indonesia. Banyak pelaku usaha kecil, sektor pertanian tradisional, serta kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem statistik nasional. Akibatnya, nilai PDB yang dilaporkan berpotensi lebih rendah dari kondisi riil ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, PNB juga memiliki keterbatasan dalam mengukur kualitas arus pendapatan dari luar negeri. Tidak semua pendapatan yang berasal dari investasi luar negeri memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan domestik. Misalnya, keuntungan perusahaan multinasional yang direpatriasi ke negara asal justru dapat mengurangi manfaat ekonomi bagi negara tuan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa angka PNB yang tinggi tidak selalu identik dengan peningkatan kapasitas ekonomi internal. Baik PDB maupun PNB cenderung mengabaikan dimensi sosial seperti tingkat pengangguran terselubung, kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Padahal, aspek-aspek tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Ketika kebijakan ekonomi hanya berorientasi pada peningkatan angka PDB atau PNB, terdapat risiko terjadinya bias pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan kuantitatif daripada kualitas pembangunan itu sendiri.

PDB tidak mencerminkan distribusi pendapatan, sehingga peningkatan ekonomi belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sementara itu, PNB tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi domestik karena dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, penggunaan kedua indikator ini perlu dilengkapi dengan indikator lain agar kebijakan ekonomi yang dihasilkan lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Ketergantungan pada PDB sebagai indikator tunggal seringkali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan degradasi sumber daya alam yang mungkin terjadi akibat produksi besar-besaran. Meskipun PDB meningkat dan pendapatan pajak melonjak, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup jangka panjang jika biaya pemulihan lingkungan tidak diperhitungkan. PNB pun memiliki tantangan dalam hal validasi data pendapatan dari luar negeri, terutama terkait kepatuhan pelaporan aset warga negara di yurisdiksi dengan pajak rendah. Penggunaan indikator pendamping seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan angka-angka makro ini benar-benar terdistribusi secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya kemungkinan distorsi akibat perbedaan metode perhitungan antar negara. Hal ini dapat menyulitkan perbandingan internasional dan berpotensi menimbulkan interpretasi yang keliru dalam analisis ekonomi global. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat memengaruhi nilai PNB secara signifikan, terutama bagi negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap arus investasi dan tenaga kerja di luar negeri. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan PDB dan PNB sebagai satu-satunya acuan. Diperlukan pendekatan multidimensional dengan mengintegrasikan berbagai indikator tambahan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio gini, serta indikator keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

3.6. Analisis Dinamika Investasi Asing dan Kemandirian Ekonomi

Dalam konteks ekonomi makro di Indonesia, selisih antara PDB dan PNB memberikan gambaran krusial mengenai struktur kemandirian ekonomi nasional. PDB yang lebih tinggi dibandingkan PNB menunjukkan bahwa aktivitas produksi di dalam negeri masih didominasi oleh faktor produksi milik asing. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun output ekonomi domestik meningkat pesat, sebagian dari nilai tambah tersebut mengalir ke luar negeri dalam bentuk repatriasi laba atau dividen bagi investor mancanegara. Ketergantungan terhadap investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) memang memberikan manfaat jangka pendek, seperti peningkatan lapangan kerja, transfer teknologi, serta akselerasi pembangunan infrastruktur. Namun, dalam jangka panjang, dominasi ini dapat menimbulkan kerentanan struktural apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas ekonomi domestik. Repatriasi keuntungan oleh perusahaan multinasional berpotensi mengurangi akumulasi modal nasional, sehingga memperlambat proses pembentukan kekayaan dalam negeri.

Selain itu, struktur investasi asing yang terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, seperti industri ekstraktif atau manufaktur berbasis sumber daya alam, juga dapat menciptakan ketergantungan yang kurang sehat. Ketika harga komoditas global berfluktuasi, stabilitas ekonomi domestik ikut terpengaruh. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengarahkan investasi, baik asing maupun domestik, ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi pada inovasi, seperti industri teknologi, ekonomi digital, dan manufaktur berbasis pengetahuan.

Oleh karena itu, strategi peningkatan pendapatan negara tidak boleh hanya terpaku pada pengejaran angka PDB semata, tetapi juga harus menyasar pada penguatan PNB melalui pemberdayaan pengusaha lokal dan ekspansi perusahaan nasional ke pasar internasional. Dengan memperkuat kapasitas produksi warga negara di luar negeri, Indonesia dapat memperkecil defisit pendapatan faktor luar negeri bersih. Hal ini akan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih stabil, di mana pendapatan negara tidak hanya bersumber dari pajak perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri, tetapi juga dari kontribusi langsung entitas bisnis nasional yang memiliki daya saing global. Transformasi ini menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik makro dapat dirasakan secara lebih nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, penting juga untuk memperbaiki iklim investasi domestik agar pelaku usaha lokal tidak kalah bersaing dengan investor asing. Reformasi regulasi, kepastian hukum, serta efisiensi birokrasi menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Dengan demikian, investasi asing tetap dapat dimanfaatkan sebagai katalis pertumbuhan, namun tidak mendominasi struktur ekonomi secara berlebihan. Keseimbangan antara pemanfaatan investasi asing dan penguatan ekonomi domestik merupakan kunci dalam mencapai kemandirian ekonomi. Strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan PNB akan membantu memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga benar-benar meningkatkan kapasitas nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.7. Analisis Efek Multiplier dan Stabilitas Fiskal Indonesia

Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, pemahaman mengenai efek pengganda (multiplier effect) dari pertumbuhan PDB menjadi sangat esensial. Setiap kenaikan dalam output domestik tidak hanya berdampak pada peningkatan pajak korporasi secara langsung, tetapi juga menciptakan rantai nilai yang mendorong konsumsi rumah tangga dan aktivitas sektor swasta. PDB yang kuat mencerminkan daya beli masyarakat yang stabil, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa PDB berfungsi sebagai mesin utama dalam menjaga ruang fiskal pemerintah agar tetap fleksibel dalam membiayai program-program strategis nasional.

Efek multiplier juga berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, misalnya melalui pembangunan infrastruktur atau program bantuan sosial, dampaknya tidak berhenti pada satu sektor saja. Belanja tersebut akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi lanjutan yang berkontribusi terhadap peningkatan PDB secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, stabilitas fiskal dapat terjaga karena peningkatan pengeluaran pemerintah diimbangi oleh kenaikan penerimaan negara yang bersumber dari aktivitas ekonomi yang semakin luas. Namun demikian, kekuatan efek pengganda sangat bergantung pada struktur ekonomi domestik. Apabila sebagian besar input produksi masih bergantung pada impor atau dikuasai oleh pihak asing, maka sebagian dari dampak multiplier akan “bocor” ke luar negeri. Hal ini menyebabkan manfaat peningkatan PDB tidak sepenuhnya dirasakan oleh perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan PNB menjadi penting sebagai indikator yang mampu menangkap sejauh mana hasil dari aktivitas ekonomi tersebut benar-benar dinikmati oleh warga negara.

Namun, stabilitas fiskal tersebut harus didukung oleh kualitas PNB yang sehat. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Riofita (2018), efisiensi birokrasi dan kemudahan akses ekonomi bagi warga negara akan memperkuat kontribusi pendapatan dari faktor produksi dalam negeri. Ketika warga negara memiliki aset atau bisnis yang produktif, baik di dalam maupun di luar negeri, aliran pendapatan yang masuk ke dalam sistem keuangan nasional akan lebih resilien terhadap fluktuasi ekonomi global. Sinergi antara PDB yang ekspansif dan PNB yang kokoh akan meminimalkan risiko defisit anggaran, karena basis pendapatan negara menjadi lebih terdiversifikasi. Dengan demikian, integrasi kedua indikator ini bukan sekadar kebutuhan statistik, melainkan keharusan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain, diversifikasi sumber pendapatan negara juga menjadi kunci dalam menjaga ketahanan fiskal. Ketergantungan yang berlebihan pada satu jenis penerimaan, seperti pajak dari sektor tertentu atau pendapatan sumber daya alam, dapat meningkatkan risiko terhadap guncangan eksternal. Dengan memperkuat PNB melalui peningkatan kepemilikan aset produktif oleh warga negara, baik di dalam maupun luar negeri, Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sinergi antara PDB yang tumbuh secara konsisten dan PNB yang kuat akan memperkuat fondasi fiskal negara. Kombinasi ini memungkinkan pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang ekspansif tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, pemanfaatan efek multiplier yang optimal, didukung oleh struktur ekonomi yang mandiri dan tata kelola fiskal yang baik, akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.8. Transformasi Ekonomi Digital dalam Memperkuat Basis PDB dan PNB

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap pengukuran pendapatan nasional di Indonesia secara fundamental. Munculnya ekonomi digital, yang mencakup perdagangan elektronik (e-commerce) dan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), memberikan kontribusi baru yang signifikan terhadap nilai PDB melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang lebih efisien. Sebagaimana dijelaskan dalam studi Riofita (2018), efektivitas dalam tata kelola dan layanan ekonomi menjadi pendorong utama bagi para pelaku usaha untuk bertransformasi ke arah digital. Dengan demikian, percepatan digitalisasi pada sektor UMKM tidak hanya meningkatkan output barang dan jasa domestik, tetapi juga mempermudah pemerintah dalam melakukan pemantauan data ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel guna optimalisasi penerimaan pajak.

Selain itu, sisi PNB juga mendapat pengaruh positif dari tren bekerja secara jarak jauh (remote working) dan ekspansi penyedia jasa profesional Indonesia di pasar global. Pendapatan yang diperoleh oleh warga negara Indonesia dari platform digital luar negeri kini menjadi komponen PNB yang semakin diperhitungkan. Hal ini membuktikan bahwa penguatan literasi digital dan dukungan infrastruktur teknologi adalah investasi jangka panjang yang krusial. Jika pemerintah mampu mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dengan ekosistem bisnis digital yang sehat, maka ketergantungan pada investasi asing yang selama ini dominan dalam PDB dapat diseimbangkan dengan peningkatan PNB dari produktivitas warga negara sendiri. Integrasi inilah yang akan menjadi motor penggerak bagi kemandirian ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik PDB dan PNB

| Dimensi Perbandingan | Produk Domestik Bruto (PDB) | Produk Nasional Bruto (PNB) |
|----------------------|--|---|
| Cakupan Wilayah | Berdasarkan batas geografis negara (Domestik). | Berdasarkan kewarganegaraan (Nasional). |
| Fokus Utama | Lokasi produksi barang dan jasa. | Kepemilikan faktor produksi. |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Sumber Pendapatan | Pajak korporasi dan PPN dari aktivitas dalam negeri | Pajak penghasilan warga negara di dalam/luar negeri. |
| Indikator Ekonomi | Mengukur produktivitas ekonomi domestik secara bruto | Mengukur tingkat kesejahteraan riil penduduk asli. |
| Dampak Digitalisasi | Transaksi e-commerce dan operasional platform di Indonesia. | Pendapatan pekerja remote dan kreator konten dari platform global. |

Berdasarkan Tabel 1, terlihat jelas bahwa PDB dan PNB memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperkuat struktur fiskal negara. Sementara PDB mengamankan penerimaan dari aktivitas di batas wilayah, PNB memastikan kontribusi ekonomi dari kapabilitas warga negara tetap terhitung sebagai kekuatan nasional.

3.9. Pengaruh Globalisasi Terhadap Dinamika PDB dan PNB

Globalisasi telah mengubah secara fundamental cara suatu negara berinteraksi dalam sistem ekonomi dunia, sehingga berdampak langsung terhadap dinamika PDB dan PNB. Integrasi pasar global memungkinkan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bergerak lebih bebas lintas negara. Kondisi ini mendorong peningkatan efisiensi produksi dan memperluas peluang pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan PDB. Masuknya investasi asing, transfer teknologi, serta adopsi praktik manajemen modern menjadi faktor yang mempercepat ekspansi sektor industri dan jasa di dalam negeri. Namun demikian, peningkatan PDB akibat globalisasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan PNB secara proporsional. Hal ini disebabkan oleh adanya aliran keluar pendapatan dalam bentuk keuntungan perusahaan asing, pembayaran bunga utang luar negeri, serta dividen yang dikirim kembali ke negara asal investor. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian nilai tambah yang dihasilkan dalam perekonomian domestik tidak sepenuhnya dinikmati oleh warga negara. Oleh karena itu, ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing dapat menciptakan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional.

Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi peningkatan PNB melalui partisipasi aktif warga negara dalam ekonomi internasional. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, ekspansi perusahaan nasional ke pasar global, serta investasi luar negeri oleh pelaku usaha domestik dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi negara. Arus remitansi dari pekerja migran, misalnya, memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan nasional serta memperkuat cadangan devisa. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang bagi peningkatan kemandirian ekonomi.

perkembangan ekonomi digital dalam era globalisasi turut memperluas dimensi interaksi ekonomi lintas negara. Perusahaan berbasis teknologi dapat beroperasi secara global tanpa kehadiran fisik yang signifikan di suatu negara, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam pengukuran PDB dan PNB. Aktivitas ekonomi digital seringkali sulit tercatat secara akurat dalam statistik nasional, sehingga berpotensi menyebabkan bias dalam pengukuran kinerja ekonomi. Dalam menghadapi dinamika tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Strategi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memperkuat regulasi terkait investasi asing, serta mendorong pelaku usaha nasional untuk berpartisipasi aktif di pasar global. Dengan demikian, manfaat globalisasi dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi domestik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) memiliki peran yang sangat penting sebagai indikator dalam meningkatkan pendapatan negara. PDB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi domestik melalui nilai produksi barang dan jasa, yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Semakin tinggi PDB, semakin besar pula potensi pendapatan negara yang dapat dihimpun. Sementara itu, PNB memberikan gambaran yang lebih luas mengenai total pendapatan yang diterima oleh warga negara, termasuk dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari aktivitas ekonomi global seperti investasi dan remitansi. Dengan demikian, PNB berperan dalam memperkuat kapasitas ekonomi nasional dan menambah sumber pendapatan negara. Kedua indikator tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja ekonomi suatu negara. PDB berfokus pada produksi dalam negeri, sedangkan PNB menekankan pada aliran pendapatan nasional.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditegaskan bahwa PDB dan PNB tidak hanya berfungsi sebagai indikator ekonomi, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan perumusan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan negara. PDB memberikan kontribusi langsung melalui aktivitas ekonomi domestik, sedangkan PNB memberikan kontribusi tambahan melalui pendapatan global. Keduanya harus dikelola secara seimbang agar mampu mendukung peningkatan pendapatan negara secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa integrasi teknologi digital dan perbaikan kualitas birokrasi, sebagaimana ditekankan dalam studi literatur pendukung, menjadi katalisator penting dalam meminimalkan kesenjangan antara nilai PDB dan PNB. Penguatan sektor UMKM melalui ekosistem digital tidak hanya meningkatkan output nasional, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih resilien terhadap fluktuasi modal asing. Oleh karena itu, kebijakan fiskal masa depan harus diarahkan pada optimalisasi kedua indikator ini secara sinergis memacu pertumbuhan PDB melalui iklim investasi yang sehat, sembari memperkokoh PNB dengan memberdayakan produktivitas warga negara agar tercipta kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

1. A. Arini, "Analisis Kondisi Perekonomian Indonesia 2020-2024: Fase Pemulihan PDB," *Jurnal Rimba*, 2024. <https://doi.org/10.61132/rimba.v3i4.2290>
2. A. Setiawan, et al., "Pengaruh PDB, ICP, dan Indeks Stabilitas Politik terhadap Penerimaan Pajak," *ResearchGate Publikasi*, 2026. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v5i2.8284>
3. E. Putra, "Masalah Ketimpangan Pendapatan dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Publikasi Artikel Ilmiah Kampus Akademik*, 2026. <https://doi.org/10.61722/jaem.v3i1.9024>
4. H. Riofita, "Analisis Indikator Makro Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Strategis*, vol. 4, no. 2, pp. 88-102, 2023. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/rio2023>
5. H. Riofita, "How Shariah-compliant digital payments influence Muslim customer's purchase decision for micro, small and medium enterprises (MSMEs) products through Sharia entrepreneurship principles," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2024. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0202>
6. H. Riofita, "Augmenting Islamic digital payment effect on Muslim customer purchase decision on micro, small and medium enterprises' (MSMEs) products," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 10, no. 4, pp. 735-758, 2024. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.353>
7. J. A. Santosa dan D. Purnomo, "Foreign investment, digitalization, and employment: An empirical study in ASEAN-6 using panel data," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitangan*, vol. 13, no. 1, hlm. 1-12, 2025. <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.831>
8. Karlina, "Analisis Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Tahun 2017 - 2021," *SEIKO: Journal of Management & Business*, vol. 5, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.4767>
9. Muhlis, N. Anggraeni, and Mujito, "Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, vol. 1, no. 1, 2025. <https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/article/view/637>
10. N. Batini, et al., "Fiscal Policy and Economic Recovery: Insights from Recent Research," *Journal of Economic Dynamics & Control*, vol. 129, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104169>
11. R. A. Setyawan, "Analisis Dampak Digitalisasi UMKM terhadap Peningkatan Pendapatan Nasional di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, vol. 3, no. 2, pp. 112-125, 2024. <https://doi.org/10.37531/ebisnis.v3i2.8821>
12. R. G. S. G. P. Putra dan T. N. S. Sulaiman, "Analisis Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019)," *Accounting, Coaching, and Control (ACC)*, vol. 8, no. 1, hlm. 1-15, 2021. <https://doi.org/10.32722/acc.v8i1.3878>
13. S. Latifa, "Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian," *Jurnal Ekonomi*, Vol.23, no.3,2021. <https://doi.org/10.61132/rimba.v3i4.2290>
14. S. Mulyani, "Effect of Gross Domestic Product and Interest Rate on Tax Revenue in Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, vol. 5, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4790>
15. S. W. Fauziah and Sindrawati, "Analisis Makroekonomi: Hubungan Investasi dan Konsumsi terhadap PDB," *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, vol. 2, no. 1, 2026. <https://doi.org/10.62567/ijosse>
16. T. Wibowo, "Sinergi PDB dan PNB dalam Menjaga Stabilitas Fiskal Nasional," *Jurnal Riset Ekonomi Makro*, 2023. [Online]. Available: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>
17. W. Lestari, "Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional Berdasarkan Indikator PNB dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Nasional*, 2025. <https://doi.org/10.62567/ijosse>